

Komunikasi Mitigasi Bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu pada Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Lemau

Dionni Ditya Perdana¹⁾, Rosi L. Vini Siregar²⁾

¹⁾Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Bengkulu,

²⁾Jurusan Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Bengkulu
(ddperdana@unib.ac.id)

Abstrak

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Bengkulu memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mitigasi bencana dikarenakan Bengkulu merupakan wilayah rentan terjadi bencana. Salah satu potensi bencana yang menjadi perhatian besar di provinsi Bengkulu yakni banjir. Oleh karena itu penelitian terkait pola komunikasi bencana yang dilakukan terhadap masyarakat di sekitar daerah aliran sungai Lemau yang mana merupakan wilayah rentan terdampak banjir perlu untuk dianalisis dan dievaluasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan yakni berupa pengamatan terhadap media komunikasi yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu yakni media sosial (facebook dan instagram). Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pra-Bencana BPBD Provinsi Bengkulu. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu dalam hal mitigasi bencana berupa koordinasi antar satuan kerja pemerintah daerah. Sedangkan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial belum terfokus pada upaya mitigasi bencana melainkan kegiatan ceremonial instansi tersebut.

Kata kunci: Komunikasi, Mitigasi, Bencana, Daerah Aliran Sungai.

Abstract

The existence of the Bengkulu Province Regional Disaster Management Agency has a very important role in disaster mitigation efforts because Bengkulu is a disaster-prone area. One of the potential disasters that is of great concern in Bengkulu province is flooding. Therefore, research related to disaster communication patterns carried out on the community around the Lemau river basin, which is a vulnerable area affected by floods, needs to be analyzed and evaluated. This research was conducted by observation and interview methods. The observations made were in the form of observations on the communication media used by the Regional Disaster Management Agency of Bengkulu Province, namely social media (Facebook and Instagram). The interview was conducted with the Head of the Pre-Disaster Division of BPBD Bengkulu Province. The findings in this study showed that the communication pattern carried out by the Regional Disaster Management Agency of Bengkulu Province in terms of disaster mitigation in the form of coordination between local government work units. At the same time, communication by utilizing social media has not been focused on disaster mitigation efforts but rather on ceremonial activities of the agency.

Keywords: Communication, Mitigation, Disaster, Watershed.

Pendahuluan

Berada di daerah dengan tatanan tektonik atau pergerakan lempeng yang aktif dan menjadi bagian dari kawasan megathrust, Bengkulu dapat dikatakan sebagai daerah rawan bencana alam. Wilayah yang sebagian besar berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan sebagian lagi merupakan perbukitan, membuat Bengkulu memiliki potensi terjadinya berbagai bencana alam. Bencana alam yang menjadi sorotan dalam dua tahun terakhir adalah banjir bandang yang menyerang sebagian besar wilayah di Bengkulu. Data menunjukkan

korban jiwa dan kerusakan akibat bencana tersebut cukup tinggi.

Hujan yang berlangsung selama 2 hari (26 – 27 April 2019) menimbulkan bencana banjir dan longsor di Provinsi Bengkulu. Bencana tersebut mengakibatkan 25 orang meninggal, 3 orang hilang, 4 orang luka-luka, 458 orang mengungsi, 45.142 orang terdampak, dan 22.820 penduduk rentan meliputi 2.039 bayi, 7.400 balita, 1.742 ibu hamil dan 11.580 lansia. Kerusakan lainnya yakni 1.225 rumah rusak, 1.187 terendam, ratusan fasilitas umum dan infrastruktur rusak, ribuan hektar kebun dan sawah warga mengalami kerusakan dan ribuan ekor ternak warga mengalami kematian, (Hendry, 2019).

Intensitas hujan yang tinggi menjadi faktor penyebab yang teridentifikasi secara langsung. Namun selain itu juga terdapat indikator lain yang menyebabkan besarnya dampak dari bencana banjir tersebut. Hal ini juga memicu perhatian masyarakat terkait tata kelola lahan, isu kerusakan lingkungan dan ketidaksiapan masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi potensi bencana alam. Beberapa korban dari bencana alam banjir tersebut teridentifikasi sedang berada di pondok perkebunan yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Minimnya informasi mengenai cuaca ekstrim membuat mereka tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana air bah (Supardi, 2020).



Kondisi banjir di wilayah Kota Bengkulu diambil dari foto udara. (Edy Prayekno)

Gambar 1. Potret Banjir di Bengkulu pada April 2019

Potret tersebut tersebar di media sosial masyarakat Bengkulu, media massa lokal hingga nasional. Potret tersebut menjelaskan gambaran luasnya daerah yang terdampak dalam bencana alam banjir. Pemikiran mengenai tingginya debit air yang tidak sebanding dengan daerah resapan membuat masyarakat dan beberapa pihak mengidentifikasi permasalahan di daerah sekitar aliran sungai yakni DAS Bengkulu dan DAS Lemau. Balai Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) memandang bahwa rehabilitasi DAS Bengkulu dan DAS Lemau merupakan kondisi yang mendesak. Identifikasi terganggunya daerah tangkapan air disebabkan krisis lahan akibat perambahan hutan dan pebalakan kayu liar, (Mayasari, 2020). Rehabilitasi hutan lindung bertujuan untuk mencegah terjadi banjir dan longsor di daerah ini pada musim hujan. Hal ini dikarenakan Bengkulu Tengah merupakan daerah rawan banjir, (Usmin, 2021).

Di lain kesempatan pemerintah daerah menerapkan beberapa program dalam upaya penanggulangan dampak bencana alam. Seperti pengukuhan relawan mitigasi oleh Gubernur Bengkulu. Relawan tersebut terdiri dari Kabupaten Rejang Lebong 161 orang, kemudian Lebong 102 orang, dan Kabupaten Kepahiang 95 orang, (Nursalikhah, 2019). Selain itu BPBD Provinsi Bengkulu juga membentuk Desa Tangguh Bencana atau disebut “Destana” di 6 kabupaten dimana desa-desa tersebut merupakan daerah yang rawan bencana alam dengan tujuan mengurangi korban jiwa dan materil saat bencana, (Panji, 2020).

Ketangguhan adalah kesadaran yang terinternalisasi sehingga dalam sebuah komunitas terciptanya kesiapsiagaan dan kapasitas dalam menghadapi bencana. Menurut definisi dari Mitigasi dan Risiko Bencana PBB (UNISDR), Kapasitas ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisir dirinya melalui pembelajaran dari bencana sebelumnya guna meningkatkan kemampuan pengurangan dampak bencana, (Nugroho & Sulistyorini, 2019). Dalam membangun ketangguhan tersebut perlu adanya komunikasi yang baik dalam upaya mitigasi bencana. Potensi komunikasi menjadi penting dalam mitigasi guna memastikan pencegahan dan pengurangan resiko. Dengan pendekatan yang tepat yakni komprehensif, sistemik dan terintegrasi antar lembaga, (HH, 2012).

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat 9 UU No 24 tahun 2017 menyebutkan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam membangun kesadaran dan kemampuan masyarakat peran pemerintah daerah atau BPBD provinsi dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana sangat memengaruhi keberhasilan upaya mitigasi yang dilakukan. Dari data tersebut penelitian ini ingin mendeskripsikan dan mengevaluasi pola komunikasi pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana yakni BPBD provinsi Bengkulu dalam upaya mitigasi bencana kepada masyarakat di daerah sekitar sungai (DAS) Lemau.

Kajian Literatur

Mitigasi Bencana

Bencana didefinisikan sebagai gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian pada kehidupan manusia. Bencana bersampak baik dari segi materi, ekonomi atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri, (*United Nation's International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR:2000)*) (Nugroho & Sulistyorini, 2019). Sedangkan pasal 1 Ayat 1 UU No 24 tahun 2017 menyebutkan bahwa bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tren bencana akan makin meningkat karena: 1) meningkatnya jumlah penduduk, 2) meningkatnya urbanisasi, 3) degradasi lingkungan, 4) kemiskinan, dan 5) pengaruh perubahan iklim global. Kejadian bencana dunia meningkat dan paling besar atau 76% adalah bencana hidrometeorologi berupa banjir, longsor, siklon tropis, kekeringan. Bencana tersebut sebagian besar terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang, (Nugroho & Sulistyorini, 2019).



Gambar 2. Infografis Bencana di Indonesia hingga 2017 (data BNPB).

Peningkatan kejadian bencana di Indonesia seharusnya menjadi landasan dalam mengevaluasi upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana. Komunikasi bencana menjadi upaya dalam membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat terhadap suatu bencana sehingga dampak dari bencana tersebut dapat ditanggulangi. Penanggulangan bencana mengalami perubahan yang mana saat ini menjadi holistik dari sebelumnya

konvensional. Fokus sebelumnya adalah menangani dampak menjadi mengelola resiko. Penanggulangan yang semula hanya urusan pemerintah, saat ini menjadi hubungan sinergis dengan masyarakat dalam pencegahan bencana. Kegiatan secara umum dalam penanggulangan bencana yakni pencegahan, pengurangan dampak, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan yang minim resiko bencana (Fedryansyah, M. Pancasilawan, 2018).

Secara umum, mitigasi bencana dalam UU No 24 Tahun 2007 dimaknai sebagai upaya perencanaan yang tepat guna meminimalisir dampak negatif bencana terhadap manusia. Mitigasi bencana meliputi: (1) prabencana, yakni kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini; (2) saat terjadi bencana, meliputi kegiatan tanggap darurat, kegiatan SAR (search and rescue), bantuan darurat, dan pengungsian, serta (3) pascabencana yang mencakup kegiatan pemilihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, (Suparmini. et al., 2014).

Mitigasi bencana dimulai dengan melakukan kajian atau identifikasi risiko bencana terhadap daerah tersebut. Untuk itu dalam menghitung risiko bencana, perlu mengetahui Bahaya (*hazard*) dan Kerentanan (*vulnerability*) suatu wilayah. Bahaya (*hazard*) mengacu pada kejadian baik alam maupun akibat perbuatan manusia sedangkan kerentanan (*vulnerability*) merupakan rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (*hazard*) dapat menimbulkan bencana (*disaster*), (Ningrum & Ginting, 2020).

Komunikasi Bencana

Komunikasi dimaknai sebagai sarana mempertemukan kebutuhan dan tujuan kita dengan kebutuhan dan tujuan pihak lain baik itu dalam kelompok, organisasi dan di masyarakat. Komunikasi dalam lingkup yang lebih besar juga menyediakan jaringan hubungan yang memungkinkan untuk melakukan aksi bersama, pembentukan identitas bersama dan pembangunan kepemimpinan (Ruben dan Stewart 2013 dalam (Rudianto, 2015).

Komunikasi Bencana diartikan sebagai proses pembuatan, pengiriman, dan penerimaan pesan dalam konteks kebencanaan (prabencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana) yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media, dan menimbulkan respons ataupun umpan balik. Komunikasi Bencana bertujuan memberikan informasi dan mengajak masyarakat siap siaga menghadapi bencana dan

mengurangi risiko bencana serta bermanfaat dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana (Lestari, 2018).

Frank Dance menyebutkan bahwa salah satu aspek penting dalam komunikasi adalah reduksi ketidakpastian. Sebagaimana komunikasi itu sendiri berhubungan dengan kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, agar dapat bertindak efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam interaksi. Berkaitan dengan penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana (Littlejohn dalam (HH, 2012).

Penyamaan persepsi terkait persoalan bencana perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, pada tataran daerah yakni BPBD. Sebagaimana pada pasal 20 UU No 24 tahun 2017 menyebut bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan. Informasi yang berlimpah tidak cukup untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya bencana yang mengancam jika cara penyampaiannya tidak tepat. Kekeliruan tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian yang justru memperburuk situasi, (Lestari, 2018). Dalam membangun sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat diperlukannya komunikasi bencana yang efektif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus sehingga penelitian akan memfokuskan pada permasalahan tertentu secara mendalam. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan yakni berupa pengamatan terhadap media komunikasi yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu yakni media sosial (facebook dan instagram). Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pra-Bencana BPBD Provinsi Bengkulu. Wawancara

dilakukan secara terstruktur guna mendapat data yang komprehensif dan menyeluruh terkait pola komunikasi. Analisis data dilakukan merujuk pada Miles & Huberman (Sugiyono, 2021) yakni Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Hasil dan Pembahasan

BPBD Provinsi Bengkulu merupakan satuan tugas yang secara khusus bertanggung-jawab dalam penanggulangan bencana di daerah Bengkulu. Peran BPBD diharapkan mampu mengurai persoalan-persoalan bencana mulai dari tahap mitigasi hingga pemulihan. Di BPBD provinsi Bengkulu, bidang khusus terkait mitigasi yakni Bidang Pra-Bencana. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pra-Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BDBP) Provinsi Bengkulu, Ir. Samsudin Syukur, M.Si. Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa upaya mitigasi yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu khususnya terkait masalah banjir yang disebabkan oleh keadaan sungai yakni:

- a. Secara struktural. BPBD telah melakukan normalisasi sungai dan membangun pelapis tebing.
- b. Secara non struktural. BPBD telah memberdayakan masyarakat dengan membentuk desa tangguh bencana.

Permasalahan banjir di sekitar daerah aliran sungai lemau diidentifikasi oleh BPBD provinsi Bengkulu bahwa keberadaan permukiman penduduk yang terlalu dekat dengan sungai. Permukiman tersebut juga tergolong padat penduduk berkisar 300 kepala keluarga. BPBD provinsi Bengkulu pernah menawarkan untuk relokasi, namun ditolak masyarakat dengan dalih masyarakat sudah memiliki strategi ketika cuaca menunjukkan curah hujan yang tinggi. Jika intensitas hujan tinggi dalam satu hari, masyarakat sudah menyiapkan barang-barang untuk diletakkan pada posisi lebih tinggi. Namun ada peluang terdampak korban jika banjir datang di malam hari dan masyarakat sedang berada di kebun yang ditunggunya.

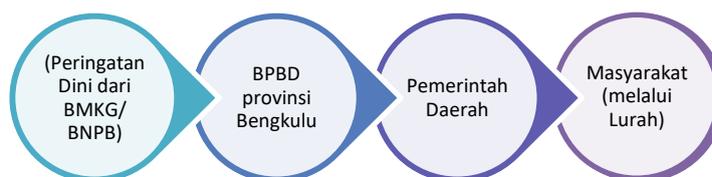
Komunikasi yang baik diperlukan dalam penanggulangan dampak dari kejadian bencana. Pemerintah dengan lembaga yang dimilikinya yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan terkait kebencanaan, salah satunya adalah mitigasi. Keberhasilan proses mitigasi bencana juga berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

Identifikasi resiko bencana menjadi poin penting dalam menentukan mitigasi yang akan dilakukan. Identifikasi resiko bencana berkaitan dengan mengetahui Bahaya (*hazard*), dan Kerentanan (*vulnerability*) suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi

fisik dan wilayahnya. Dalam permasalahan di daerah aliran sungai Lemau, yang diidentifikasi oleh BPBD yakni adanya potensi banjir yang dapat merugikan kebun, sawah dan bahkan menghilangkan nyawa karena faktor permukiman penduduk yang cukup dekat dan cukup padat.

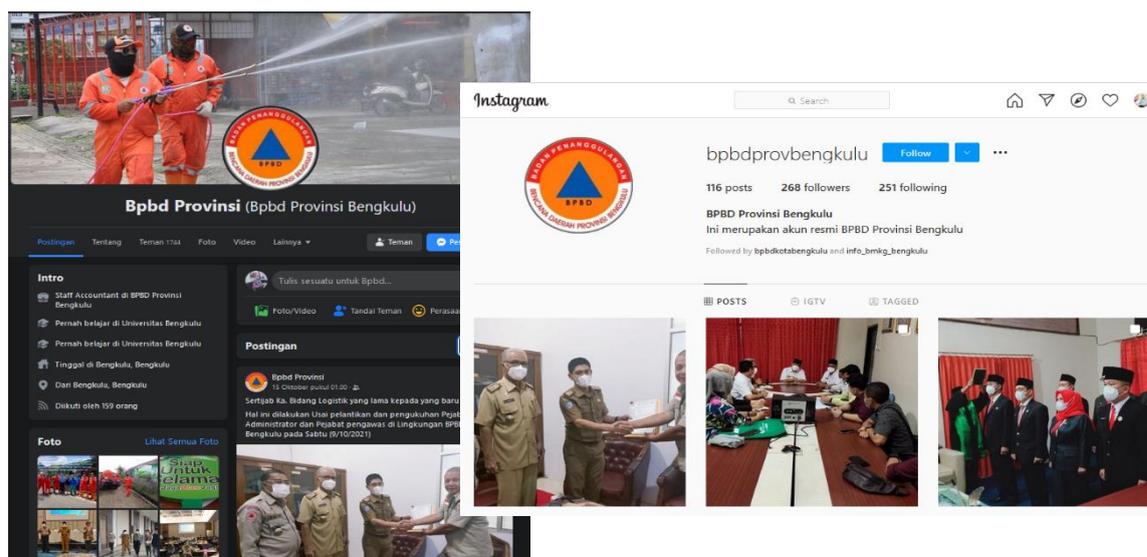
Mitigasi bencana alam banjir berkaitan dengan pengawasan lokasi, desain bangunan, penjagaan lingkungan dan pelatihan kewaspadaan banjir. Dalam hal ini BPBD telah melakukan normalisasi sungai, membangun pelapis tebing, dan memberdayakan masyarakat dengan membentuk desa tangguh bencana. Proses komunikasi dalam mitigasi bencana yang kemudian disoroti adalah bagaimana pola komunikasi hingga informasi mitigasi bencana sampai ke masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan BPBD provinsi Bengkulu untuk terus membangun kesiapan masyarakat terhadap bencana dilakukan dengan berkoordinasi secara langsung (tatap muka) maupun melalui aplikasi percakapan (whatsapp group). Koordinasi tersebut yakni kepada instansi-instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam penanganan bencana, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian artinya peranan pemerintah daerah untuk meneruskan informasi kebencanaan menjadi ujung tombak sampainya informasi tersebut kepada masyarakat. Alur komunikasi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Komunikasi

Kesadaran akan perkembangan di era digital mengharuskan pemerintah membuat akun media sosial sebagai bagian dari pelayanan publik khususnya kebutuhan informasi bagi masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu juga menunjukkan keberadaannya dalam media sosial diantaranya Facebook dan Instagram. Facebook dengan nama “Bpbd Provinsi (Bpbd Provinsi Bengkulu)” dan Instagram “bpbddprovbengkulu” terkonfirmasi merupakan akun resmi milik BPBD Provinsi Bengkulu.



Gambar 4. Media Sosial BPBD Provinsi Bengkulu

Dari observasi yang dilakukan terhadap kedua media sosial tersebut hingga Oktober 2021 dapat diketahui bahwa akun facebook BPBD Provinsi Bengkulu memiliki jumlah pertemanan sebanyak 1.744 dan akun instagramnya memiliki pengikut sebanyak 268. Kedua akun sosial media tersebut mengunggah konten untuk pertama kali di tahun 2021 dimulai pada bulan Maret, bahkan akun instagram baru mulai beroperasi Maret 2021.

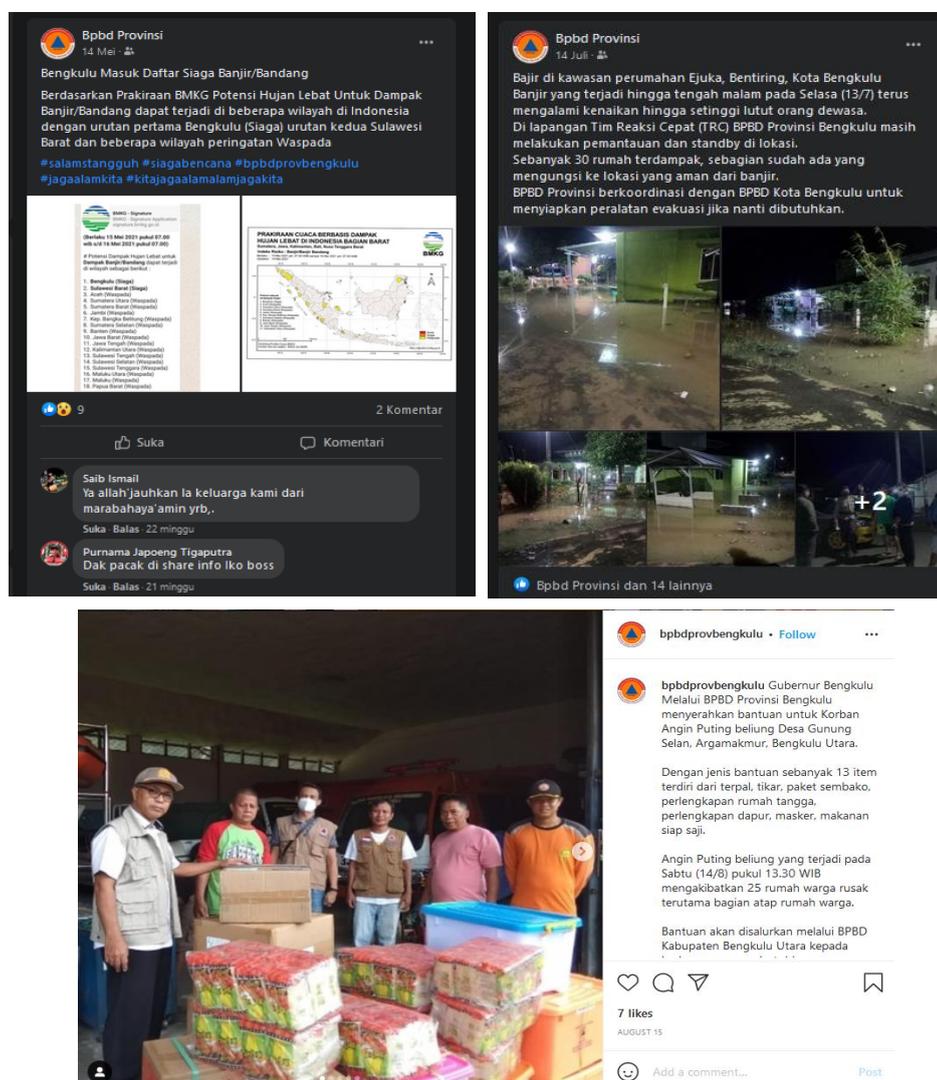
Peneliti kemudian menemukan beberapa kategori unggahan konten yang dikelompokkan menjadi:

- a. Konten bermuatan informasi pra-bencana
- b. Konten bermuatan informasi saat terjadi bencana
- c. Konten bermuatan informasi pasca-bencana
- d. Konten terkait Covid-19 dan Vaksinasi
- e. Konten kegiatan ceremonial
- f. Konten berisi ucapan

Dari kategori tersebut, baik di facebook maupun instagram yang mendominasi unggahan yakni konten berupa kegiatan ceremonial. Di tahun 2021, bulan Maret hingga Oktober 2021 terdapat 52 unggahan di facebook dan 50 unggahan di instagram yang berisikan informasi kegiatan ceremonial BPBD Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut seperti kegiatan apel pagi, rapat koordinasi, penandatanganan kerja sama dan kegiatan serupa lainnya.

Unggahan terkait covid-19 dan vaksinasi juga muncul sebagai konten yang dominan memenuhi media sosial BPBD Provinsi Bengkulu. 36 unggahan di facebook dan 22 di instagram, unggahan terkait covid-19 dan vaksinasi berupa pengumuman kebijakan pemerintah, pengumuman angka penyebaran covid-19 di Bengkulu, informasi kegiatan

vaksinasi dan kegiatan pemberian bantuan terdampak covid-19. Konten berisikan ucapan juga menghiasi akun media sosial BPBD provinsi Bengkulu, ucapan terkait pelantikan pejabat, hari besar, prestasi pemerintah daerah, ucapan belasungkawa dan hingga pernikahan.



Gambar 5. Konten Informasi Kebencanaan

Konten yang bermuatan informasi kebencanaan baik itu pra-bencana, saat kejadian bencana dan pasca-bencana justru sangat minim ditemukan di kedua media sosial tersebut. Konten pra-bencana yang pernah diunggah adalah pemberitahuan terkait cuaca buruk yang merupakan bentuk unggahan ulang (re-posting) dari laman BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Unggahan saat kejadian bencana juga hanya ditemukan 1 konten sepanjang 2021, konten tersebut menginformasikan kondisi banjir di suatu wilayah di Bengkulu. Konten pasca-bencana yang muncul berupa penyerahan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat korban bencana.

Kesimpulan

BPBD Provinsi Bengkulu telah melakukan mitigasi pada daerah aliran sungai khususnya terkait masalah banjir yakni secara struktural dan non struktural. Secara structural BPBD telah melakukan normalisasi sungai dan membangun pelapis tebing. Sedangkan secara non structural, BPBD telah memberdayakan masyarakat dengan membentuk desa tangguh bencana. Dalam membangun kesiapan masyarakat terhadap bencana, komunikasi yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu dilakukan dengan berkoordinasi secara langsung (tatap muka) maupun melalui aplikasi percakapan (*whatsapp group*). Koordinasi antar instansi-instansi pemerintah dilakukan dalam memberikan informasi kebencanaan. Selain itu, BPBD Provinsi Bengkulu juga menyadari perkembangan teknologi komunikasi dalam kaitannya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya akun media sosial (facebook dan instagram) resmi milik BPBD Provinsi Bengkulu. Namun dalam media sosial tersebut masih sangat minim adanya komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, saran dalam penelitian ini, diharapkan BPBD Provinsi Bengkulu menjadi instansi pemerintah yang lebih komunikatif dalam hal mitigasi bencana.

Ucapan Terimakasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan atas dukungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bengkulu, untuk itu penulis ucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Daftar Pustaka

- Fedryansyah, M. Pancasilawan, R. I. (2018). Penanggulangan Bencana di Masyarakat Desa (Studi di Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang). *Jurnal Share: Social Work Jurnal*, 8(1).
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/15961>
- Hendry, D. (2019). *Banjir dan Longsor Bengkulu, Bagaimana Kondisi DAS Bengkulu dan DAS Lemau?* Livebengkulu. <https://livebengkulu.com/2019/06/04/banjir-dan-longsor-bengkulu-bagaimana-kondisi-das-bengkulu-dan-das-lemau/>
- HH, S. B. (2012). Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama). *Jurnal Komunikasi*, 1(4).
<https://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/36>

- Lestari, P. (2018). *Komunikasi Bencana: Aspek Penting Pengurangan Resiko Bencana*. PT. Kanisius.
- Mayasari, A. (2020). *BPDASHL Bengkulu akan rehabilitasi DAS Bengkulu dan DAS Lemau*. Antaranews Bengkulu. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/139472/bpdashl-bengkulu-akan-rehabilitasi-das-bengkulu-dan-das-lemau>
- Ningrum, A. S., & Ginting, K. B. (2020). Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa. *Jurnal GEOSEE: Geography Science Education Explored Journal*, 1(1). <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/geosee/article/view/1919>
- Nugroho, S. P., & Sulistyorini, D. (2019). *Komunikasi Bencana: Membedah Relasi BNPB dengan Media*. Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Nursalikah, A. (2019). *Gubernur: Bengkulu Termasuk Kawasan Rawan Bencana*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/q2em0b366/gubernur-bengkulu-termasuk-kawasan-rawan-bencana>
- Panji. (2020). *120 Kecamatan di Bengkulu Rawan Bencana Alam*. Tuntasonline. <https://www.tuntasonline.com/2020/09/08/120-kecamatan-di-bengkulu-rawan-bencana-alam>
- Rudianto. (2015). Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Simbolika*, 1(1).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Supardi, A. (2020). *Banjir dan Longsor, Jangan Sampai Terulang Lagi di Bengkulu*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/08/banjir-dan-longsor-jangan-sampai-terulang-lagi-di-bengkulu/>
- Suparmini., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2014). Mitigasi Bencana Berbasi Kearifan Lokal Masyarakat Baduy. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 19(1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3511>
- Usmin. (2021). *2.000 Hektare Lahan Kritis di DAS Bengkulu Direhabilitasi*. Beritasatu. <https://www.beritasatu.com/nasional/721941/2000-hektare-lahan-kritis-di-das-bengkulu-direhabilitasi>